

# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)**

## **BIRO HUMAS SEKRETARIAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **TAHUN 2016**

---

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Perangkat yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan. RPJMD Tahun 2016 – 2021 mempunyai 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah yaitu :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan pariwisata, industry, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
9. Pengembangan sumber energy baru dan terbarukan serta pembengunan infrastruktur dan
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Dalam Tahun Anggaran 2016, Biro Humas melaksanakan 9 Program dan 41 Kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 9.411.973.000,- Pada APBD Perubahan 2016, Biro Humas menambah anggaran pada 8 (delapan) kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air Listrik, Pengada Mobuebeler, Pengadaan Komputer, Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik, Liputan Kegiatan Pemerintah, I, Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak, Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik, dan Pengelolaan Website , sehingga total Anggaran Biro Humas setelah perubahan adalah **Rp.9.940.624.00,-**.

Realisasi Fisik Biro Humas pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah 98.61% dan Realisasi Keuangannya adalah sebesar Rp. **8.072.466.804,- (81,21%)**.

#### **A. Urusan Wajib yang dilaksanakan**

##### **1. Program dan Kegiatan**

###### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;**

1. Penyediaan Jasa Surat Meyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Alat tulis Kantor
5. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
9. Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi

###### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Mubeler
2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Koputerisasi
3. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
4. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan jaringan Komputerisasi
8. Pemeliharaan rutin/berkala intalasi Jaringan
9. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

###### **c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

###### **d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
2. Penatausahaan Keuangan SKPD

## **B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan**

### **1. Program dan Kegiatan**

#### **a. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

1. Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
2. Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko
3. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
4. Pengkajian Analisa Pemberitaan
5. Koordinasi Kehumasan
6. Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional

#### **b. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan**

1. Liputan Kegiatan Pemerintah
2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak
3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik
4. Penyebarluasan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)
5. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan
6. Pembuatan Film Dokumentaer Potensi daerah
7. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Ruang

#### **c. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika**

1. Pengelolaan Website Pemprov. Sumatera Barat
2. Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom

#### **d. Program Pengelolaan e-Government Pemerintah daerah**

1. Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Government Kab/Ko
2. Implementasi Mobile Community Access Point (M-CAP)
3. Implementasi Mobile Community Access Point (Mobile)

### **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.563.970.000**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi dana sebesar Rp. 9.960.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 9.956.000,- (99.96%)*

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik alokasi dana sebesar Rp. 927.700.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 892.474.589 (96.20%)*

3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah alokasi dana sebesar Rp.17.000.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 16.007.000 (94.16%)*

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor alokasi dana Dana Rp. 12.460.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 12.442.600,- (99.86%)*

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dana Rp. 41.350.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp41245.000,- (99.75%)*

- 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Dana: Rp. 298.000.000

*Realisasi Keuangan: Rp. 297.948.000,- (99.98%)*

- 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Rp. 6.000.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 5.990.000,- (99.83%)*

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  
Dana Rp. 1.98.000.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 196.736.930,- (99.36%)*

9. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Dana  
Rp.533.500.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 53.250.000 (99.53%)*

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dana sebesar Rp.291.108000 dengan kegiatan sebagai berikut :**

1. Pengadaan Muebeler Dana Rp. 15.000.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 3.600.000,- (23.84%)*

2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Dana  
Rp.25.000.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 10.650.000,- (42.60%)*

3. Pengadaan Peralatan alat Studio Komunaksi dan alat Informasi Dana  
Rp. 59.500.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 59.300.000,- (99.66%)*

- 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi Dana Rp. 3.500.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 3.470.000,- (99.14%)*

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Dana Rp.77.098.000

*Realisasi Keuangan: Rp. 75.497.500,- (97.92%)*

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Rp. 2.900.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 2.900.000,- (100 %)*

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi dana Rp. 6.600.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 6.6.590.000- (99.85%)*

8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Jaringan Dana Rp. 78.350.000.-

*Realisasi Keuangan: Rp. 77.500.000,- (98.92%)*

9. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dana Rp.23.606.000

*Realisasi Keuangan: Rp. 20.025.000,- (99.85%)-*

**c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dana Rp. 97.400.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 25.584.000 (26.27%)*

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana Rp. 5.610.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 5.569.000 (99.27%)*

2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dana Rp.7.800.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 7.780.000,- (99.36%)*

3. Penatausahaan Keuangan SKPD Dana Rp. 79.215.000,-

*Realisasi Keuangan: Rp. 79.189.000,- (99.97%)*

## **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pilihan**

### **a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dana Rp.68.500.000**

1. Kegiatan Bimtek Peyanan Informasi Publik dana Rp. 68.500.000,-  
*Realisasi Keuangan: Rp. 40.017.150 (58.42 %)*

### **b. Program Informasi Komunikasi Komunikasi Publik dana Rp.848.895.000 kegiatan sebagai berikut:**

1. Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dana Rp. 190.873.000,-  
*Realisasi Keuangan: Rp. 101.476.225 (53.16 %)*
2. Koordinasi dan Pengembagnn Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko) Dana Rp. 73.000.000  
*Realisasi Keuangan: Rp. 63.203.813 (86.58 %)*
3. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dana Rp. 45.871.000.
4. Pengkajian Analisa Informasi Pemberitaan dana Rp.122.701.000  
*Realisasi Keuangan: Rp. 103.831.211,- (84.62%)*
5. Koordinasi Kehumasan dana Rp. 270.382.000  
*Realisasi Keuangan: Rp. 259.560.900 (96.00 %)*
6. Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional dana Rp. 146.068.000,-  
*Realisasi Keuangan: Rp. 114.621.305 (78.47 %)*

### **c. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dana sebesar Rp.2.323.967.000 kegiatan sebagai berikut :**

1. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah dana Rp. 750.000.000,-  
*Realisasi Keuangan: Rp. 734.707.150 (99,46 %)*
2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media cetak dana Rp. 748.339.000,-  
*Realisasi Keuangan: Rp. 739.698.500,- (98.85 %)*
3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik Dana Rp. 360.851.000,-  
*Realisasi Keuangan: Rp. 304.739.125,- (98,18 %)*
4. Penyebarluasan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dana Rp. 70.961.400,-  
*Realisasi Keuangan: Rp. 70.488.500 (99.33 %)*

5. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan

Dana Rp. 86.336.000

*Realisasi Keuangan:* Rp. 82.550.700,- (95.62 %)

6. Pembutana Filem Dokumenter

Dana Rp. 35.000.000

*Realisasi Keuangan:* Rp. 33.741.000 (96.40%)

7. Penyebarluasan Informasi Dalam Upaya Penyuluhan Bagi Masyarakat

Dana Rp. 272.480.000,-

*Realisasi Keuangan:* Rp. 268.520.250,- (98,54 %)

**d. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika dana  
Rp.2.191.000.000 dengan kegiatan sebagai berikut:**

1. Pengelolaan website pemerintah provinsi Sumatera Barat

*Dana :* Rp. 300.000.000,-

*Realisasi Keuangan:* Rp. 291.497.600,- (97,17 %)

2. Lanjutan pembangunan Gedung Inforkom

*Dana :* Rp. 1.891.000.000,-

*Realisasi Keuangan:* Rp. 1.697.621.950,- (89,77 %)

**e. Program Pengelolaan e-Govermernt Pemerintah Daerah dana  
Rp. 2.463.159.000**

1. Koordinasi pembinaan implementasi e-Government Kab/Kota

Dana Rp62.873.000,-

*Realisasi Keuangan:* Rp58.763.115,- (93,46%)

2. Implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dana Rp2.330.434.000,-

*Realisasi Keuangan:* Rp1.097.366.280,- (47,09%)

3. Implementasi Mobile Community Access Point (M-CAP)

Dana Rp69.852.000,-

*Realisasi Keuangan:* Rp68.614.125,- (98.23%)

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan yang dilaksanakan tidak terlaksana secara maksimal karena terhalang Berikut ini adalah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut:

- a. Ketatnya aturan dalam proses dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Kegiatan pelaksanaan bersifat Bimtek evaluasinya masih minim sehingga Outcomenya tidak dapat diukur
- c. Masih minimnya jumlah SDM bidang kehumasan, komunikasi dan informasi yang berkualitas terutama yang menguasai Teknologi Informasi (TI)
- d. Masalah agenda Pimpinan belum tertata dengan baik sehingga liputan pemberitaan belum optimal

### **C. Standar Pelayanan Minimal**

Biro Humas yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan, dan evaluasi hubungan masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XXII Pasal 391-395 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengumumkan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya kepada masyarakat.

Sebagai SKPD yang memiliki fungsi melaksanakan hubungan masyarakat, Biro Humas juga memiliki kewajiban untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menuntut Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang efisien dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, dalam mengejawantahkan dua kewajiban utamanya ini, Biro Humas dapat menggunakan sarana komunikasi, sebagai berikut:

1. Media Massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi;
2. Media Baru (*website*);
3. Media Tradisional seperti Kelompok Informasi Masyarakat atau Kelompok Media Tradisional;
4. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya;
5. Media Luar Ruang berupa buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho; dan,
6. Media Sosial.

Lebih lanjut, dalam Lampiran Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara jelas memberikan Target dan Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut:

**Tabel Target dan Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU	SATUAN KERJA
		INDIKATOR	NILAI		
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:			SKPD yang menangani urusan bidang Komunikasi dan Informatika
		Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi	12 kali per tahun	1 Tahun	
		Media baru seperti <i>website</i>	Setiap hari	1 Tahun	
		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali pertahun	1 Tahun	
		Media interpersonal	12 kali per tahun setiap kecamatan	1 Tahun	
		Media luar ruang	12 kali per tahun	1 Tahun	
2	Pengembangan	Cakupan	50%	1 Tahun	SKPD yang

	dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			menangani urusan bidang Komunikasi dan Informatika
--	--	--	--	--	--

Bagaimanapun, Target dan Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang pada tabel di atas hanya terbatas pada tingkat Kabupaten/Kota, tidak di Tingkat Provinsi.

#### D. PEGAWAI

Jumlah PNS Biro Humas tahun 2016 tercatat sebanyak 44 orang yang semuanya sudah berstatus PNS, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah PNS Biro HUMAS Tahun 2016**

No	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D III	SMA	SMP	
1	Eselon II/b	1					1
2	Eselon III/a	3					3
3	Eselon IV/a	2	7				9
4	Staf	1	5	3	23	0	31
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>44</b>

#### 1 Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud diantaranya adalah berupa komputer untuk jaringan simaya 12 buah komputer/laptop sebanyak 28 (tujuh belas) unit, printer 11 unit telepon 1 (satu) unit dan kendaraan dinas operasional 5 (lima) unit, satu unit mobil dinas Kepala/pimpinan dan 3 (tiga ) unit kendaraan roda Empat opsional dan 1 unit kendaraan roda dua untuk operasional pengantar surat.

#### 2. Program dan Kegiatan dan Dukungan Dana

Secara keseluruhan, anggaran yang teralokasi pada Biro Perekonomian tahun 2016 sebesar Rp. **9.940.624.00,-** untuk mendukung pelaksanaan **41 (Empat puluh satu )** kegiatan pada 9 (sembilan) program, dengan rincian menurut belanja langsung pokok dan belanja langsung sebagai berikut :

### 3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan yang dilaksanakan tidak terlaksana secara maksimal karena terhalang Berikut ini adalah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut:

- e. Ketatnya aturan dalam proses dalam pelaksanaan kegiatan
- f. Kegiatan pelaksanaan bersifat Bimtek evaluasinya masih minim sehingga Outcomenya tidak dapat diukur
- g. Masih minimnya jumlah SDM bidang kehumasan, komunikasi dan informasi yang berkualitas terutama yang menguasai Teknologi Informasi (TI)
- h. Masalah agenda Pimpinan belum tertata dengan baik sehingga liputan pemberitaan belum optimal
- i. Tuntutan dan tantangan kebutuhan publik/masyarakat terhadap pelayanan informasi public penyelenggaraan Pemerintah, dimana keberadaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) disetiap SKPD sesuai dengan Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- j. Kemajuan Teknologi Informasi dan kecanggihan peralatan (sarana) belum mampu dimanfaatkan secara optimal
- k. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk pendukung kegiatan operasional kehumasan dan IT

Solusi yang mungkin dapat dilakukan dalam melihat, mengatasi persoalan yang disebutkan diatas dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perlunya meningkatkan koordinasi dan perhatian setiap SKPD dan lembaga dilingkungan Pemprov Sumbar dalam membangun kepercayaan publik terhadap setiap program/kegiatan perlu lebih diintensifkan lagi untuk bekerjasama dalam membangun pencitraan Pemerintah Daerah.
- b. Perlu dilakukan kegiatan pelatihan teknis dan pengiriman aparat pada setiap pelatihan kehumasan, komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan pengetahuan

peraturan perundang-undangan tentang jurnalistik pers dan keterbukaan informasi publik.

- c. Perlu penambahan SDM humas yang memahami teknologi informasi
- d. Perlu dilakukan pertemuan/dialog yang periodik, dengan mitra kerja insan pers dan media dalam peningkatan kerjasama membangun hubungan yang lebih harmonis
- e. Perlu dukungan sarana dan parsarana operasional yang memadai untuk kelancaran kegiatan operasional kehumasan.

## KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 dari Januari hingga bulan Desember 2016, Biro Humas secara Internal tidak mengalami kendala yang berarti, dimana terlihat dari capaian realisasi fisik Biro Humas adalah 98,61% dan realisasi keuangannya adalah 81,21 %.

Beberapa kendala yang sering dan masih menjadi persoalan secara Ekternal adalah masih kurang kuatnya sinergitas antar SKPD dan lembaga di lingkungan Pemprov Sumbar dalam koordinasi setiap program/kegiatan, sehingga perlu lebih diintensifkan lagi kerjasama dalam membangun pencitraan Pemerintah Daerah.

Demikianlah Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini dibuat untuk menjadi bahan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Humas di tahun mendatang.

Padang, Desember 2016  
KEPALA BIRO HUMAS

**Drs. Jasman, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680101 198809 1 001



## **I. URUSAN DESENTRALISASI**

### **A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2016**

Pada Tahun 2016 setelah perubahan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan yaitu Program "Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat" yang diaplikasikan kedalam 1 (satu) kegiatan pokok dan Program "Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum" yang diaplikasikan kedalam 11 (sebelas) kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 2 (dua) program dengan 12 (dua belas) kegiatan tersebut sebesar **Rp. 6.201.553.115,-** dengan rincian sebagai berikut:

a). **Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp. 200.114.400,- dengan kegiatan, yaitu:**

1). Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat  
Rp. 200.114.400,-

b). **Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum mendapat dukungan dana sebesar Rp. 6.001.438.715,- dengan 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:**

- 1). Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Rp. 3.679.470.500,-
- 2). Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp. 640.526.000,-

- 3). Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan  
Rp. 265.366.500,-
- 4). Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan  
Rp. 487.525.715,-
- 5). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Rp. 175.440.000,-
- 6). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Rp. 135.110.000,-
- 7). Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Rp. 60.000.000,-
- 8). Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)  
Rp. 100.000.000,-
- 9). Penyusunan Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Rp. 188.000.000,-
- 10). Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Rp. 100.000.000,-
- 11). Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)  
Rp. 170.000.000

Pada Tahun 2016 setelah perubahan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan yaitu Program "Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat" yang diaplikasikan kedalam 1 (satu) kegiatan pokok dan Program "Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum" yang diaplikasikan kedalam 11 (sebelas) kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 2 (dua) program dengan 12 (dua belas) kegiatan tersebut sebesar **Rp. 6.201.553.115,-** dengan rincian sebagai berikut:

c). **Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp. 200.114.400,- dengan kegiatan, yaitu:**

- 2). Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat  
Rp. 200.114.400,-

d). **Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum mendapat dukungan dana sebesar Rp. 6.001.438.715,- dengan 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:**

- 12). Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Rp. 3.679.470.500,-
- 13). Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp. 640.526.000,-
- 14). Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan  
Rp. 265.366.500,-



- 15). Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan  
Rp. 487.525.715,-
- 16). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Rp. 175.440.000,-
- 17). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Rp. 135.110.000,-
- 18). Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Rp. 60.000.000,-
- 19). Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)  
Rp. 100.000.000,-
- 20). Penyusunan Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Rp. 188.000.000,-
- 21). Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Rp. 100.000.000,-
- 22). Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)  
Rp. 170.000.000

## 2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL

(Dalam hal SPM belum ada, didasarkan atas pencapaian program kegiatan)

### REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2015 dapat diikhtisarkan sebagai berikut ;

a). **Program Mengimplementasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan yaitu :**

1). **Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian Program	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan
Masukan	a. Jumlah Dana Rp. 200.114.400,- b. Jumlah auditor/pemeriksa 30 (tiga puluh ) orang c. Kendaraan roda empat untuk operasional sebanyak 2 (dua) unit
Keluaran	Persentase kasus yang ditangani dan diselesaikan 100%
	a. Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2016 - Fisik <b>100 %</b> - Keuangan <b>Rp. 171.435.700,-(85.67%)</b>
	b. Kasus PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Kasus PP 32/1979 tentang Pemberhentian PNS 13 kasus
	c. Khusus Pengaduan Masyarakat 3 kasus
	d. Khusus Instruksi/permintaan pejabat berwenang 13 kasus
	e. PP No. 10/1983 yo PP No. 45/1990 4 kasus

	tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;	
	-Permohonan izin melakukan perceraian	
	a. Disetujui b. Ditolak c. Damai - Kasus PP No.10/1983/PP No.45/1990 Lainnya	2 Orang 1 Orang - Orang  1 Kasus
	e. Rekomendasi hukuman disiplin sesuai PP 53/2010, PP 32/1979, PP No. 10/1983 yo PP No. 45/1990 sebagai berikut ;	
	- Hukuman Disiplin Berat - Hukuman Disiplin Sedang - Hukuman Disiplin Ringan	12 Org 9 Org 14 Org
	f. Terdapat 3 (dua) masalah yang mengakibatkan kerugian negara/ daerah senilai Rp. 601.249.153,-	
	g. Jumlah kasus-kasus/khusus selama satu tahun yang diselesaikan sebanyak 33 Kasus	
Hasil	Tercapainya prosentase rata-rata kasus-kasus/khusus yang diperiksa (100%)	
Manfaat	Terselesaikannya kasus-kasus/khusus yang diperiksa	

**b. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum, dengan 12 (dua belas) kegiatan yaitu :**

**1). Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian Program	Meningkatkan fungsi lembaga pengawas dan aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan korupsi
Masukan	a. Jumlah Dana <b>Rp. 3.679.470.500,-</b> b. Kendaraan roda empat untuk operasional sebanyak 4 (empat) unit c. Jumlah auditor/P2UPD/pemeriksa sebanyak 40 (empat puluh) Orang
Keluaran	a. Realisasi Fisik dan Keuangan s/d 31 Desember 2016
	- Fisik <b>100 %</b> - Keuangan <b>Rp. 3.508.399.899,- (95.35%)</b>
	b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan sebanyak 1459 temuan dengan 3239 saran terdapat/berupa temuan kerugian Negara/Daerah dan kewajiban penyeteroran kepada Negara/Daerah) senilai Rp 872.712.245,-
	c. Jumlah obrik pemeriksaan reguler 66 OP, dan telah diperiksa semuanya.
	- Jumlah obrik 66 OP - Yang diperiksa 65 OP (98,50%)

	d. Target LHP sebanyak 137 buah , realisasi 136 LHP	
	- Target LHP	137 LHP
	- Realisasi	136 LHP (99,27%)
	e. Terlaksananya Pra Reviu, Reviu SKPD, dan Reviu LKPD sebanyak 3 kali (3 Laporan)	
	f. Terlaksananya Evaluasi LAKIP sebanyak 49 SKPD Provinsi	
Hasil	Tersedianya data laporan hasil pengawasan/pemeriksaan	
Manfaat	Lancarnya Pelaksanaan kegiatan Pengawasan	

## 2). Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan korupsi
Masukan	a. Jumlah Dana Rp. 640.526.000,- b. Jumlah tenaga sebanyak 10 (sepuluh) orang c. Kendaraan roda empat untuk operasional sebanyak 1 (satu) unit
Keluaran	a. Realisasi Fisik dan Keuangan s/d 31 Desember 2016 - Fisik <b>100 %</b> - Keuangan <b>Rp. 625.490.248,- (97.65%)</b> b. Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan: Saran Realisasi TL - Inspektorat Provinsi 3239 2231 (68.90%) - BPK 70 33 (47.14 %) - Itjen Kementerian Dalam Negeri - - c. Monitoring/ pemantauan TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi, BPK, Itjen 20 Kali Kepmendagri, dan Itjen Kementerian Teknis lainnya d. Rapat Koordinasi Pengawasan Pembahasan Tindak Lanjut - Itjen Kepmendagri 5 Kali e. Rapat Pemutakhiran Data - Itjen Kepmendagri 2 Kali f. Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - BPK 8 Kali
Hasil	Tersedianya data hasil pengawasan
Manfaat	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan Inspektorat Provinsi & APF lainnya serta lancarnya pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

## 3). Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan korupsi
Masukan	a. Jumlah Dana Rp. 265.366.500,-

Keluaran	<p>a. Realisasi Fisik dan Keuangan s/d 31 Desember 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fisik <b>100 %</b></li> <li>- Keuangan <b>Rp. 242.580.700,-(91.41%)</b></li> </ul> <p>b. Jumlah peserta peningkatan pengawasan aparatur sebanyak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Fungsional 8 Org</li> <li>- Diklat Teknis 6 Org</li> <li>- Diklat/Penataran Lainnya <u>40 Org</u></li> <li style="text-align: right;">54 Org</li> </ul>
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur pengawasan
Manfaat	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Sumbar

#### 4). Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum dalam pemberantasan korupsi
Masukan	<p>a. Jumlah Dana Rp. 487.525.715,-</p> <p>b. Jumlah Komputer 4 (empat) unit</p>
Keluaran	<p>a. Realisasi Fisik &amp; Keuangan s/d 31 Desember 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fisik <b>100 %</b></li> <li>Keuangan <b>Rp. 483.896.720,- (99.26%)</b></li> </ul> <p>b. Koordinasi pengawasan ke luar dan ke dalam daerah antara lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat penyusunan Program Kerja internal 2 Kali</li> </ul> </li> <li>2. Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pra Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggara-an Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional ( Pra Rakorwasdanas) dengan Itjen Departemen /Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Dept. 1 Kali</li> <li>▪ Rakorwasdanas dengan Itjen Kementerian/ Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Dept. 1 Kali</li> <li>▪ Rapat Koordinasi / Konsultasi Teknis Kerja dengan Itjen Kementerian DDN, dan Itjen Kementerian lainnya. 2 Kali</li> </ul> </li> </ol>
Hasil	Terjadwal dan terkoordinasinya PKPT
Manfaat	Terlaksananya program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2016 dan terkoordinasinya/tersusunnya PKPT 2017.

#### 5). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum dalam pemberantasan korupsi
Masukan	a. Jumlah Dana Rp. 175.440.000,-

	b. Jumlah Tim Evaluasi sebanyak 10 (sepuluh) orang c. Kendaraan roda empat untuk operasional 1 (satu) unit
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2016 Fisik <b>100 %</b> Keuangan <b>Rp. 165.373.500,- (94.26%)</b> 1. Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap 19 Kabupaten/Kota 2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 19 buah laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100%
Manfaat	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/kota yang lebih baik

## 6) Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Masukan	Jumlah Dana Rp. 135.110.000,-
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2016 Fisik <b>100 %</b> Keuangan <b>Rp. 108.114.300,- (80.02%)</b> Terselenggaranya penilaian resiko serta penyusunan SOP secara bertahap Pemprov Sumbar
Hasil	Ditetapkannya daftar resiko, peta dan penanganan resiko serta dokumen SOP di lingkungan Pemprov Sumbar 1 Laporan
Manfaat	Terlaksananya SPIP di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

## 7) Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian Program	Meningkat fungsi lembaga pengawas dan aparatur
Masukan	Jumlah Dana Rp. 60.000.000,-
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2016 Fisik <b>100 %</b> Keuangan <b>Rp. 53.591.803,- (89.32%)</b> a. Terselenggaranya Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat b. Jumlah Laporan 1 buah laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 100%
Manfaat	Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

## 8) Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
-------------------	-----------------

Capaian Program	Meningkat fungsi lembaga pengawas dan aparatur
Masukan	Jumlah Dana Rp. 100.000.000,-
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2016 Fisik <b>100 %</b> Keuangan <b>Rp. 81.139.675,- (81.14%)</b> Terselenggaranya Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
Hasil	Tersedianya Laporan Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 100 %
Manfaat	Terbinanya SKPD untuk menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

### 9) Penyusunan Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian Program	Meningkat fungsi lembaga pengawas dan aparatur
Masukan	Jumlah Dana Rp. 188.000.000,-
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2016 Fisik <b>100 %</b> Keuangan <b>Rp. 169.104.450,- (89.95%)</b> a. Tersusunnya Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah b. Jumlah 1 buah Peraturan Daerah
Hasil	Terlaksananya Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah sesuai aturan
Manfaat	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih

### 10) Pengendalian Gratifikasi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian Program	Meningkat fungsi lembaga pengawas dan aparatur
Masukan	Jumlah Dana Rp. 100.000.000,-
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2016 Fisik <b>100 %</b> Keuangan <b>Rp. 80.728.650,- (80.73%)</b> a. Terselenggaranya Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi b. Jumlah Laporan 1 buah laporan
Hasil	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan SKPD tentang Gratifikasi Pemerintah Daerah 100%
Manfaat	Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

### 12) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
Capaian	Meningkat fungsi lembaga pengawas dan aparatur

Program	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 170.000.000,-
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2016 Fisik <b>100 %</b> Keuangan <b>Rp. 159.854.050,- (94.03%)</b> a. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Harta Kekayaan bagi Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN b. Jumlah Laporan 1 buah laporan
Hasil	Terlaksananya pembinaan LHKPN dan LHKASN dilingkungan Pemrov Sumbar 100%
Manfaat	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang mentaati azas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN dan perbuatan tercela lainnya di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

### 3. **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB**

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

### 4. **JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**

Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

**Tabel 1 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	12	13,64
3.	S.1	46	52,27
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	4	4,54
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	25	28,41
9.	SLTP	1	1,14
10.	SD	-	-
Jumlah		<b>88</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

**Tabel 2 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan**

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	<b>7</b>	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	3	-	-	-	3	

2.	- Eselon IV	3	-	-	1	2
	Fungsional Auditor	<b>20</b>	-	-	-	-
	- Ahli madya	7	-	-	-	7
	- Ahli muda	2	-	-	2	-
	- Pertama	9	-	-	9	-
	- Penyelia	1	-	-	1	-
	- Pelaksana lanjut	1	-	-	1	-
3.	P2UPD	<b>14</b>	-	-	-	-
	- Pengawas Pem. Madya	6	-	-	-	6
	- Pengawas Pem. Muda	8	-	-	8	-
	- Pengawas Pem. Pertama	-	-	-	-	-
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	<b>1</b>	-	-	-	1
5.	Non JFA/P2UPD	<b>5</b>	-	1	4	-
6.	Staf(Fungsional Umum)	<b>41</b>	-	16	25	-
7.	PTT	-	-	-	-	-
Jumlah		<b>88</b>	-	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>20</b>

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

**Tabel 3 : Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	42	47,73
2.	Perempuan	46	52,27
Jumlah		<b>88</b>	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

#### 5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan Capaian Kinerja Pelayanan (CKP) yang diharapkan tahun 2016. Semakin tinggi CKP yang di harapkan, semakin besar kebutuhan anggaran dan sebaliknya Anggaran besar akan menghasilkan pelayanan masyarakat besar pula dan sebaliknya. Dari dua program yang telah ditetapkan tadi sebagai penunjang program/kegiatan pengawasan pada tahun 2016 melalui APBD kinerja telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) setelah Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 16.169.101.879,-** dengan rincian sebagai berikut:

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
o BELANJA TIDAK LANGSUNG	<b>7.735.101.879</b>	<b>7.499.317.835</b>	<b>96.95</b>	<b>235.784.044</b>
o BELANJA LANGSUNG	<b>8.434.000.000</b>	<b>7.955.072.981</b>	<b>94.32</b>	<b>478.927.019</b>
<b>Jumlah</b>	<b>16.169.101.879</b>	<b>15.454.390.816</b>	<b>95.57</b>	<b>714.711.063</b>

Adapun Realisasi Keuangan termasuk Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 16.169.101.879,-** rincian sebagai berikut :



SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.735.101.879</b>	<b>7.499.317.835</b>	<b>235.784.044</b>	<b>96.95</b>
- Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.555.232.499	5.528.834.911	26.397.588	99.52
- Tambahan Penghasilan PNS	2.179.869.380	1.970.482.924	209.386.456	98.56
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8.434.000.000</b>	<b>7.955.072.981</b>	<b>478.927.019</b>	<b>94.32</b>
<b>1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>1.762.901.885</b>	<b>1.652.576.877</b>	<b>110.325.008</b>	<b>93.74</b>
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.152.000	23.092.250	59.750	99.74
b. Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	185.400.000	161.965.373	23.434.627	87.36
c. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36.950.000	34.175.975	2.774.025	92.49
d. Jasa kebersihan kantor	100.000.000	91.619.000	8.381.000	91.62
e. Penyediaan Jasa alat tulis kantor	72.662.340	70.258.500	2.403.840	96.69
f. Penyediaan Barang cetakan Penggandaan	64.314.545	51.067.875	13.246.670	79.40
g. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.665.000	4.603.000	1.062.000	81.25
h. Peralatan dan perlengkapan kantor	153.400.000	151.464.000	1.936.000	98.74
i. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33.000.000	32.970.400	29.600	99.91
j. Penyediaan Makanan dan minuman	42.570.000	42.534.100	35.900	99.92
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	823.400.000	805.279.404	18.120.596	97.80
l. Penyediaan Jasa Sopir Kantor	24.516.000	18.387.000	6.129.000	75.00
m. Jasa Pengamanan Kantor	191.472.000	159.560.000	31.912.000	83.33
n. Jasa pembinaan fisik dan mental aparatur	6.400.000	5.600.000	800.000	87.50
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>303.803.000</b>	<b>290.505.909</b>	<b>13.297.091</b>	<b>95.62</b>
a. Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	-	-	-
b. Pengadaan Meubeler	60.000.000	59.400.000	600.000	99.00
c. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	43.000.000	42.817.500	182.500	99.58
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	96.000.000	92.957.159	3.042.841	96.83
e. Pemeliharaan rutin /berkala meubeler	5.000.000	4.855.000	145.000	97.10
f. Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	28.100.000	28.070.950	29.050	99.90
g. Pemeliharaan rutin /berkala Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	3.900.000	3.890.000	10.000	99.74
h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	18.350.000	10.081.000	8.269.000	54.94
i. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	25.000.000	24.808.300	191.700	99.23
j. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	24.453.000	23.626.000	827.000	96.62
<b>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>51.840.000</b>	<b>51.691.200</b>	<b>148.800</b>	<b>99.71</b>
a. Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	51.840.000	51.691.200	148.800	99.71
<b>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>19.504.000</b>	<b>16.232.000</b>	<b>3.272.000</b>	<b>83.22</b>
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	19.504.000	16.232.000	3.272.000	83.22

<b>5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>94.398.000</b>	<b>94.357.300</b>	<b>40.700</b>	<b>99.96</b>
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.900.000	6.900.000	0	100
b. Penatausahaan Keuangan SKPD	87.498.000	87.457.300	40.700	99.95
<b>6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>200.114.400</b>	<b>171.435.700</b>	<b>28.678.700</b>	<b>85.67</b>
a. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat	200.114.400	171.435.700	28.678.700	85.67
<b>7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum</b>	<b>6.001.438.715</b>	<b>5.678.273.995</b>	<b>323.164.720</b>	<b>94.62</b>
a. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	3.679.470.500	3.508.399.899	171.070.601	95.35
b. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	640.526.000	625.490.248	15.035.752	97.65
c. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	265.366.500	242.580.700	22.785.800	91.41
d. Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	478.525.715	483.896.720	3.628.995	99.26
e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	175.440.000	165.373.500	10.066.500	94.26
f. Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Provinsi (SPIP)	135.110.000	108.114.300	26.995.700	80.02
g. Workshop Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	60.000.000	53.591.803	6.408.197	89.32
h. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	100.000.000	81.139.675	18.860.325	81.14
i. Penyusunan Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	188.000.000	169.104.450	18.895.550	89.95
j. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	100.000.000	80.728.650	19.271.350	80.73
k. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	170.000.000	159.854.050	10.145.950	94.03

**6. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP, KURANG, MENCUKUPI, ATAU LAINNYA )**

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat tahun 2016 sebagai berikut :

**Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016**

No	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)	KONDISI		
	JENIS BARANG			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	4	5	6	7		
1	Tanah Bangunan Kantor	1 lks	1,097,970,000	1	-	-
	<u>PERALATAN DAN MESIN</u>					
1	Roda Empat/Mobil	8 unit	1.559.767.000,-	8	-	-
2	Sepeda Motor	1 unit	17.065.500,-	1		

3	Alat ukur	2 unit	3.883.000,-	2	-	-
4	Rak siku lobang	4 unit	23.760.000,-	4	-	-
5	Filing Kabinet	8 unit	18.539.000,-	5	3	-
6	Brand Kas	2 unit	320.000,-	2	-	-
7	White board	3 unit	2.841.000,-	2	-	-
8	Penghancur kertas	4 unit	12.100.000,-	4	-	-
9	Finger print	2 unit	7.150.000,-	1	1	-
10	Lemari arsip	15 unit	68.290.000,-	15	-	-
11	Lemari arsip eselon 3	4 unit	39.580.000,-	4	-	-
12	Lemari arsip eselon 2	1 unit	14.245.000,-	1	-	-
13	Meja Rapat	18 unit	44.747.500,-	18	-	-
14	Kursi rapat / putar	94 unit	73.346.000,-	94	-	-
15	Kursi putar siding	16 unit	11.000.000,-	16	-	-
16	Kursi kerja staf	32 unit	36.960.000,-	32	-	-
17	Kursi rapat aula	100 unit	37.400.000,-	100	-	-
18	Meja kerja	55 unit	9.625.000,-	55	-	-
19	Meja kerja staf	57 unit	112.860.000,-	57	-	-
20	Pentas mini	1 unit	1.650.000,-	1	-	-
21	Meja televise	1 unit	1.500.000,-	1	-	-
22	Lemari es	1 unit	4.972.000,-	1	-	-
23	AC Split	21 unit	169.907.600,-	21	-	-
24	Kipas angin	3 unit	1.356.000,-	1	-	2
25	Televisi	1 unit	6.380.000,-	1	-	-
26	Speaker	2 unit	9.845.000,-	2	-	-
27	Speaker colom (merk toa)	1 unit	1.419.000,-	1	-	-
28	Wireles	1 unit	8.937.500,-	1	-	-
29	Power Amplifie	1 unit	4.455.000,-	1	-	-
30	Mixer	1 unit	6.765.000,-	1	-	-
31	Toa Amplifier	1 unit	1.430.000,-	1	-	-
32	Creas chairmen	1 unit	1.391.500,-	1	-	-
33	Creas power	1 unit	2.062.500	1	-	-
34	Sound sistem	1 unit	10.560.000,-	1	-	-
35	Crossover Digital	1 unit	7.950.000,-	1	-	-
36	Generator set	1 unit	59.730.000,-	1	-	-
37	UPS/Stabilizer	1 unit	2.970.000,-	1	-	-
38	Lbg. Burung Garuda	1 unit	650.000,-	1	-	-
39	Gambar Presiden	1 unit	500.000,-	1	-	-
40	Gambar Wk Presiden	1 unit	500.000,-	1	-	-
41	Meja Fodium	1 unit	215.000,-	1	-	-
42	Alat Pemadam	1 unit	888.000,-	-	-	1
43	Personal Computer	13 unit	132.397.500,-	11	-	2
44	Program aplikasi gaji	1 unit	4.950.000,-	-	-	1
45	Jaringan SIPKD	1 paket	7.012.500,-	1	-	-
46	Note Book	25 unit	271.573.500,-	23	-	2
47	Printer	26 unit	66.322.000,-	14	-	3
48	Meja kerja eselon III	1 unit	7.800.000,-	1	-	-
49	Meja kerja pejabat eselon III/IV	4 unit	19.800.000,-	4	-	-
50	Kursi tamu	7 unit	23.677.500,-	7	-	-
51	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit	4.925.000,-	1	-	-

52	Kursi kerja pejabat eselon III/IV	7 unit	19.321.500,-	7		
53	Kursi tamu pejabat eselon II	1 unit	22.550.000,-	1		
54	Kursi tamu pejabat eselon III/IV	2 unit	19.800.000,-	2		
55	Lemari Pustaka/Rak	1 unit	1.980.000,-	1	-	-
56	CCTV	2 paket	57.200.000,-	2	-	-
57	Proyektor	1 unit	24.915.000,-	1	-	-
58	Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext	1 unit	42.900.000,-	1	-	1
59	Faximile	1 unit	9.350.000,-	1	-	-
60	Mesin hitung uang	1 unit	4.400.000,-	1	-	-
61	Mesin foto copy	1 unit	119.075.000,-	1	-	-
	<u>GEDUNG DAN BANGUNAN</u>					
62	Bangunan Kantor	1 lokasi	3.117.638.658,-			
	<u>JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN</u>					
	<u>ASET TETAP LAINNYA</u>					
	Buku Peraturan dan Umum		38.491.174,-			
	<u>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</u>	-	-	-	-	-

## 7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah masih rendahnya tingkat kesadaran SKPD yang diperiksa (auditan) untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi. Hal ini perlu diberikan sanksi secara berjenjang bagi pejabat/pegawai yang tidak menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Padang, Desember 2016**  
**INSPEKTUR PROVINSI**

**H. ERIZAL, SH**

**Pembina Utama Madya**  
**NIP 19570925 198312 1 001**